

# Pengukuran Kinerja Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan dalam Meningkatkan Keterserapan Lulusan di Dunia Kerja

## *Performance Assessment Of Vocational High School Bursa Kerja Khusus To Improve The Absorption Of Graduates In The Working Field*

Nur Fitriana\* & Sri Wibawani

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Diterima: 18 Februari 2022; Direview: 19 Februari 2022; Disetujui: 27 April 2022

Email : [nriafitriana.31@gmail.com](mailto:nriafitriana.31@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat ketercapaian kinerja Bursa Kerja Khusus (BKK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan keterserapan lulusan di dunia kerja. Masalah difokuskan pada kinerja BKK belum berjalan efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi pelayanan penempatan kerja serta bimbingan karir kepada siswa maupun alumni SMK sebagaimana keterserapan lulusan di dunia kerja yakni dunia industri (DU) maupun dunia usaha (DU) masih dibawah 75% dan lulusan SMK sebagai penyumbang pengangguran terbuka tertinggi di Kabupaten Sidoarjo pada Agustus 2018–Agustus 2020. Guna mendekati masalah tersebut digunakan teori pengukuran kinerja dari Dwiyanto (2018) meliputi; produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BKK SMK Kabupaten Sidoarjo diperoleh persentase sebesar 42,5% dan hasil tiap sub variabel kinerja; (1) dimensi produktivitas diperoleh 42,5% (2) dimensi kualitas pelayanan diperoleh 55% (3) dimensi responsivitas diperoleh 42,5%, (4) dimensi responsibilitas diperoleh 50%, dan (5) dimensi akuntabilitas diperoleh 37,5%.

**Kata Kunci:** Penilaian Kinerja; Kinerja Organisasi; Bursa Kerja Khusus; Sekolah Menengah Kejuruan.

### Abstract

*This article aims to describe and analyze the level of achievement of the performance of the Bursa Kerja Khusus (BKK) of Vocational High School in Sidoarjo Regency to improving the absorption of graduates in the working field. The problem focused on BKK's performance has not been effective in carrying out its duties as a work placement service organization and career guidance to students and vocational school graduates in the same manner as the absorption of graduates in the working field, namely The World Business and Industry is still below 75% and vocational school graduates as the highest contributor of open unemployment in Sidoarjo Regency in August 2018-August 2020. To approach the problem used performance assessment theory from Dwiyanto (2018) there are; productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. This research uses descriptive quantitative research methods. The results showed that the performance of BKK SMK Sidoarjo Regency obtained a percentage of 42.5% and the results of each sub-variable performance; (1) productivity dimension obtained 42.5% (2) dimension of service quality obtained 55% (3) dimension of responsiveness obtained 42.5%, (4) dimension responsibilities obtained 50%, and (5) dimension accountability obtained 37.5%.*

**Keywords:** Performance Assessment; Organizational Performance; Bursa Kerja Khusus; Vocational High School.

**How to Cite:** Fitriana, N., & Wibawani, S., (2022), *Pengukuran Kinerja Bursa Kerja Khusus SMK Kabupaten Sidoarjo Dalam Meningkatkan Keterserapan Lulusan di Dunia Kerja*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (4): 2697 - 2706.



## PENDAHULUAN

Pengangguran didefinisikan sebagai permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi negara maju dan negara berkembang, salah satunya Indonesia. Pengangguran ialah permasalahan makro ekonomi yang menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi seperti pembatasan pengeluaran konsumsi disebabkan tidak adanya pendapatan. Pengangguran dalam jangka panjang berdampak pada kurang baiknya psikologis bagi diri penganggur maupun keluarga penganggur (Sukirno, 2016). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran merupakan mereka yang tergolong kedalam kelompok penduduk usia kerja tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulai bekerja, konsep pengangguran tersebut umumnya disebut pengangguran terbuka.

Melihat kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada 2020 menunjukkan tingginya tingkat pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) mendokumentasikan total pengangguran terbuka tingkat nasional pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang atau 7,07% dari total angkatan kerja, jumlah ini melonjak 1,84% poin dibandingkan dengan Agustus 2019 (*Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*, 2020). Jumlah pengangguran yang tinggi sebagaimana dinyatakan (Siagian, 2020) bahwa beberapa aspek penyebab pengangguran terbuka yakni minimnya pengetahuan dan keterampilan para pencari kerja yang sesuai dengan kualifikasi organisasi atau perusahaan. Serta kebijakan tidak merekrut tenaga kerja akibat kelesuhan bidang ekonomi, seperti resesi yang dialami Indonesia atas dampak Covid-19 sejak akhir Desember 2019 menyebabkan peningkatan pengangguran terjadi di 34 provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Timur pada 2020, pengangguran meningkat 466,02 ribu orang pada Agustus 2020 (*Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Agustus 2020*, 2020). Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam peningkatan pengangguran tertinggi pada 2020 di Provinsi Jawa Timur. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 77 ribu orang dan TPT menjadi 131,44 ribu orang menganggur pada Agustus 2020 (*Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Sidoarjo Agustus 2020*, 2020).

Fenomena pengangguran terbuka secara nasional, provinsi salah satunya Provinsi Jawa Timur, hingga di Kabupaten Sidoarjo faktanya berdasarkan status pendidikan diduduki alumnus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai posisi penyumbang pengangguran tertinggi. Sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2020 didominasi lulusan SMK sebesar 11,18% pada 2018, 10,36% pada 2019, dan 13,55% pada 2020 (*Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*, 2020). Pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur pada Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2020 lulusan SMK mendominasi sebesar 8,56% pada 2018, 8,39% pada 2019, dan 11,89% pada 2020 (*Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Agustus 2020*, 2020). Pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo juga diduduki oleh lulusan SMK yaitu 6,4% pada 2018, 7,1% pada 2019, dan 14,9% pada 2020 (*Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Sidoarjo Agustus 2020*, 2020). Adapun jumlah absolut pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo menurut tingkat pendidikan pada 2020, SMK mencapai Rp 43.041 lulusan menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka yang didominasi lulusan SMK diatas mengartikan bahwa tidak adanya *link and match* antara pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja. Data-data statistik tersebut, menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan SMK belum sepenuhnya dengan yang diharapkan menjadi penggerak dalam perbaikan ekonomi negara (Mulyatiningsih et al., 2014). Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 menegaskan bahwasannya tujuan pendidikan kejuruan ialah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Kesuksesan pendidikan kejuruan tidak hanya dilihat dari selesainya siswa menempuh program studi melainkan besarnya jumlah alumni yang memasuki dunia kerja atau berwirausaha.

Merespon tujuan dan harapan terhadap pendidikan SMK, pemerintah berupaya merevitalisasi SMK agar terjadi peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten pada level menengah sehingga menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Didalam instruksi presiden tersebut memerintahkan kepada kementerian ketenagakerjaan untuk menyusun kebutuhan perencanaan tenaga kerja dari alumnus SMK. Perencanaan tersebut mencakup; tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi atau penempatan, dan waktu. Dalam bidang lokasi atau penempatan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memperluas pelayanan penempatan tenaga kerja untuk dilakukan di lembaga satuan pendidikan menengah, salah satunya pendidikan menengah kejuruan yaitu dibentuknya unit pelayanan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK sebagai fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada alumninya.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja pasal 33 ayat 1 hingga ayat 2 menegaskan bahwa BKK dibentuk oleh kepala satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja. Erfitriana (2016) dalam (Putra et al., 2019) menyatakan bahwa BKK sebagai koneksi antara lapangan pekerjaan dengan pencari kerja, salah satunya BKK SMK yang diperuntukkan kepada siswa SMK dan alumni SMK. BKK SMK berkolaborasi dengan industri guna memudahkan perolehan informasi lowongan pekerjaan dan meningkatkan penempatan maupun penyaluran lulusan. Melalui BKK SMK, siswa memperoleh informasi lowongan pekerjaan, bimbingan karier.

Melihat pengangguran yang terus meningkat di Kabupaten Sidoarjo dan didominasi oleh lulusan SMK. Maka BKK pada tiap SMK di Kabupaten Sidoarjo berperan besar dalam menyalurkan alumninya ke Dunia Usaha (DU) maupun Dunia Industri (DI). Alhasil dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Sidoarjo yang didominasi lulusan SMK. Adapun BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 73 BKK SMK. Pengelolaan BKK SMK secara optimum akan berdampak positif bagi peserta didik SMK maupun alumni SMK di Kabupaten Sidoarjo. Namun pada kenyataannya BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo belum mempraktikkan tugasnya dengan optimum. Sebagaimana tujuan pembentukan BKK SMK belum tercapai dalam menaikkan angka keterserapan lulusan SMK pada DU/DI. Hal tersebut dapat dilihat pada Berita Resmi Statistik bahwa penduduk bekerja atau terserap di DU/DI menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Sidoarjo pada Agustus 2018 hingga Agustus 2020 masih diduduki oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Keterserapan SMK pada 2018 sebanyak 21,90%, pada 2019 sebesar 23,25%, dan pada 2020 sebesar 23,10% (*Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Sidoarjo Agustus 2020*, 2020). Persentase keterserapan lulusan SMK tersebut masih dibawah 75%. Sebagaimana Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dalam (Cahyanti et al., 2018) menyatakan bahwa lulusan SMK dikatakan berhasil dalam dunia kerja apabila tenggang waktu lulusan memperoleh pekerjaan setelah lulus maksimal satu tahun dan keterserapan lulusan dalam periode dua tahun setelah lulus minimal 75%. Keberhasilan BKK dilihat dari tingginya lulusan yang terserap di DU/DI. Hal tersebut juga merupakan visi dan misi dari organisasi BKK.

Capaian kinerja BKK dapat diasumsikan belum berjalan dengan efektif atau belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi pelayanan penempatan kerja serta bimbingan karir kepada siswa maupun alumni SMK sebagaimana keterserapan lulusan yang masih kurang dari yang ditargetkan. Surjadi (2009:07) dalam menyatakan kinerja organisasi merupakan totalitas capaian atau hasil kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga kinerja organisasi dapat dinilai dari berhasil tidaknya terhadap tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Penelitian oleh (Putra et al., 2019) berjudul "Evaluasi penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus dalam membantu menyalurkan lulusan ke industri di SMK Negeri 1 Udanawu Kabupaten Blitar" dengan hasil penelitian deskripsi penyelenggaraan BKK di SMK Negeri 1 Udanawu" ditinjau dari segi *Context, Input, Proses, dan Product* (CIPP). Kemudian penelitian oleh (Listiana, 2019) berjudul "Manajemen Bursa Kerja Khusus dalam Upaya Peningkatan Penyaluran Lulusan SMK ke

Dunia Kerja” dengan hasil penelitian deskripsi manajemen BKK SMK Negeri 2 Pengasih ditinjau dari empat fungsi pokok manajemen; *planning, organizing, actuating, dan evaluating/controlling*. Dan penelitian oleh (Triana et al., 2021) berjudul “Pelaksanaan Layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam Upaya Meningkatkan Keterserapan Lulusan” dengan hasil penelitian deskripsi pelaksanaan layanan BKK dan hambatan-pada SMK Widya Praja Ungaran ditinjau dari empat dimensi pelayanan; keandalan, daya tanggap, empati, dan jaminan. Ketiga penelitian tersebut merupakan penelitian evaluatif manajemen pelayanan BKK SMK sebagaimana relevan dengan topik pada penelitian ini yakni pengukuran kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo dan lokus ketiga penelitian tersebut pada salah satu SMK. Maka, pada penelitian ini bermaksud melakukan penelitian pengukuran kinerja BKK SMK se-Kabupaten Sidoarjo dikarenakan belum ada penelitian yang meneliti pada semua BKK SMK dengan menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja untuk analisis kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana semua BKK SMK berpedoman pada peraturan tersebut dalam pelaksanaan pelayanan BKK termasuk deskripsi tugas dan fungsi BKK termuat dalam peraturan tersebut.

Penelitian pengukuran kinerja BKK SMK se-Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori lima dimensi pengukuran kinerja organisasi publik sebagaimana dikemukakan (Dwiyanto et al., 2018) diantaranya yakni; produktivitas sebagai pengukuran efisiensi dan efektivitas pelayanan, kualitas layanan ialah indikator kinerja yang orientasinya kepuasan masyarakat, responsivitas ialah daya tanggap organisasi dalam merespon kebutuhan masyarakat, keahlian penyusunan agenda hingga prioritas pelayanan, tanggungjawab ialah pelaksanaan organisasi publik didasarkan pada dasar administrasi yang resmi dan akuntabilitas ialah pertanggungjawaban agenda organisasi publik Sehingga, peneliti juga menggunakan menggunakan penelitian terdahulu oleh (Rosni et al., 2020) berjudul “Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor)” sebagaimana penelitian tersebut menggunakan teori pengukuran kinerja yang sama, perbedaannya terletak pada lokus yang berbeda.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merepresentasikan situasi-situasi sosial secara jelas (Mulyadi, 2013). Populasi penelitian ini bersifat homogen/terbatas yaitu pada 73 BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo melalui tiap ketua BKK sebagai responden guna mewakili kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi (*locus*) penelitian ini dilakukan di Bursa Kerja Khusus SMK se-Kabupaten Sidoarjo dan Forum Bursa Kerja Khusus atau yang disingkat F-BKK Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di SMK PGRI 2 Sidoarjo, Jalan Jenggolo III No.61, Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61219. Lokasi tersebut, sebagaimana lokasi BKK SMK PGRI 2 Sidoarjo. F-BKK Kabupaten Sidoarjo dibentuk guna membantu menyalurkan dan menempatkan tamatan SMK memasuki dunia kerja atau dunia usaha melalui satu kesatuan koordinasi antar BKK SMK se-Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengambilan sampel melalui teknik *sampling kuota dan simple random sampling*. Teknik *sampling kuota* digunakan karena populasi 73 BKK SMK telah ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/596/438.1.1.2/2021 Tentang Tim Bursa Kerja Khusus Dan Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Sidoarjo yang menegaskan pembagian anggota Forum Bursa Kerja Khusus Kabupaten Sidoarjo (FBKK-SDA) menjadi 4 wilayah. Kemudian, ditentukan sampel sejumlah 10 BKK SMK dari 4 wilayah tersebut melalui *simple random sampling* untuk pembagian kuesioner. Sehingga total sampel penelitian ini yaitu 40 BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo.

Instrumen penelitian ini dioperasionalkan oleh peneliti berdasarkan definisi operasional variabel teori pengukuran kinerja oleh (Dwiyanto et al., 2018) dan disesuaikan dengan pedoman BKK yang tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja dan website resmi Direktorat Pembinaan SMK ([bkk.ditpsmk.net](http://bkk.ditpsmk.net), 2018). Pengumpulan data pada penelitian ini melalui kuesioner. Uji coba

kuesioner pada 10 responden dalam hal ini 10 BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo di Wilayah 1 guna uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 20, adapun hasil kedua uji tersebut sebagai berikut.

Dimensi	No. Pertanyaan	r.hitung	r.tabel	Keterangan
Produktivitas	1	0,706	0,632	Valid
	2	0,707		Valid
	3	0,704		Valid
	4	0,694		Valid
	5	0,697		Valid
	6	0,704		Valid
	7	0,789		Valid
	8	0,682		Valid
	9	0,693		Valid
Kualitas Pelayanan	10	0,772		Valid
	11	0,695		Valid
	12	0,701		Valid
	13	0,674		Valid
Responsivitas	14	0,697		Valid
	15	0,829		Valid
	16	0,715		Valid
Responsibilitas	17	0,739		Valid
	18	0,802		Valid
Akuntabilitas	19	0,740		Valid
	20	0,770		Valid

Gambar 1. Hasil Uji Validitas  
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2021.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas	
Cronbach' Alpha	N of Items
.944	20

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2021.

Metode analisis menggunakan analisis data deskriptif sebagaimana ditunjukkan mengetahui variabel mandiri tanpa membuat perbandingan antar variabel satu dengan variabel lain (Sugiyono, 2017). Guna mengetahui kategori penilaian variabel kinerja dan kategori penilaian sub variabel kinerja digunakan rumus berikut (Riduwan, 2014) :

$$\text{Interval Kelas} = \frac{(\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}) + 1}{\text{Jumlah Kategori}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyajian Data dan Analisis Variabel

Pada sub bab ini, peneliti mendeskripsikan frekuensi jawaban dan analisis kategori penilaian sub variabel kinerja yakni; produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Serta analisis kategori penilaian variabel kinerja. Adapun kategori penilaian tersebut diantaranya:

Tidak Baik : TB  
Kurang Baik : KB  
Cukup Baik : CB  
Baik : B  
Sangat Baik : SB

#### 1. Produktivitas

Tabel 2. Kategori Penilaian Sub Variabel Produktivitas

No	Interval Kelas	Interval Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1	8,5 - 15,9	9 - 15	TB	0	0
2	16,0 - 23,3	16 - 23	KB	6	15,0
3	23,4 - 30,7	24 - 30	CB	11	27,5
4	30,8 - 38,1	31 - 38	B	17	42,5
5	38,2 - 45,5	39 - 45	SB	6	15,0

Sumber : Diolah dari rekapitulasi jawaban responden, Januari 2022



Produktivitas ialah pengukuran efisiensi dan efektivitas pelayanan melalui rasio antara input dengan output. Produktivitas BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo termasuk kategori baik dengan persentase 42,5%. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan dana operasional pelayanan dari pemerintah atau pihak sekolah maupun sarana prasarana seperti ruang khusus BKK dan peralatan administrasi yang lengkap. Adapun faktor yang mempengaruhi kurangnya produktivitas BKK yakni minimnya sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKK, sehingga mengakibatkan beberapa petugas BKK merangkap tugas dari bidang lainnya. Serta kurangnya konsistensi petugas BKK dalam memberikan pelatihan *entrepreneur* kepada siswa maupun alumni. Selain itu, sumber dana dalam pelayanan BKK pada kurun waktu setahun pada beberapa BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo 25%-50% berasal dari dana petugas BKK serta peralatan administrasi kurang lengkap dan tidak memiliki ruang khusus pelayanan BKK.

## 2. Kualitas Layanan

**Tabel 3. Kategori Penilaian Sub Variabel Kualitas Layanan**

No	Interval Kelas	Interval Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1	3,5 - 6,9	4 - 6	TB	0	0
2	7,0 - 10,3	7 - 10	KB	4	10,0
3	10,4 - 13,7	11 - 13	CB	10	25,0
4	13,8 - 17,1	14 - 17	B	22	55,0
5	17,2 - 20,5	18 - 20	SB	4	10,0

Sumber: Diolah dari rekapitulasi jawaban responden, Januari 2022

Kualitas layanan merupakan indikator kinerja organisasi publik guna mengetahui tingkat capaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga didapatkan kepuasan masyarakat untuk menilai kinerja organisasi tersebut. Kualitas pelayanan BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo termasuk kategori baik dengan persentase 55%. Hal tersebut dapat diketahui dari pembagian tugas dalam memberikan tiga pelayanan meliputi; informasi lapangan kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja sebagian besar dilakukan oleh 2 orang secara khusus diberikan tanggungjawab. Selain itu, komitmen petugas BKK yang sering mendahulukan pelayanan kepada siswa maupun alumni ketika terdapat tugas lain diluar kepentingan BKK, dan keahlian petugas BKK dalam melakukan penelusuran alumni (*tracer study*) melalui *website* sekolah, *link google formulir*, dan *WA Group* setelah kelulusan/wisudah. Namun, berdasarkan hasil survei mayoritas Ketua BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa problema pengangguran di Kabupaten Sidoarjo yang didominasi oleh lulusan SMK tiap tahun, salah satu penyebabnya yakni tidak semua siswa mengisi link penelusuran. Sehingga mengakibatkan BKK sulit melakukan penyaluran dan penempatan alumni.

## 3. Responsivitas

**Tabel 4. Kategori Penilaian Sub Variabel Responsivitas**

No	Interval Kelas	Interval Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1	2,5 - 5,1	3 - 5	TB	0	0
2	5,2 - 7,7	6 - 7	KB	4	10,0
3	7,8 - 10,3	8 - 10	CB	13	32,5
4	10,4 - 12,9	11 - 12	B	17	42,5
5	13,0 - 15,5	13 - 15	SB	6	15,0

Sumber : Diolah dari rekapitulasi jawaban responden, Januari 2022

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam mengenali dan melaksanakan misi dan tujuan utamanya untuk menunaikan kebutuhan masyarakat. Responsivitas BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo termasuk kategori baik dengan persentase 42,5%. Hal tersebut diketahui melalui respon/tanggapan petugas BKK yang responsif dan proaktif dalam melayani kebutuhan

dan keluhan alumni terkait penyaluran dan penempatan di dunia kerja dan pelaksanaan misi BKK yang disusun dengan perencanaan strategis dalam 1 tahun kedepan. Namun, hasil survei dimensi responsivitas diketahui bahwa sebagian besar BKK di Kabupaten Sidoarjo kurang konsisten dalam melakukan program keterampilan tambahan dan program bimbingan wawancara hingga psikotest. Hal tersebut, merupakan salah satu faktor penyebab kurangnya kesiapan lulusan ketika melakukan seleksi pekerjaan.

#### 4. Responsibilitas

**Tabel 5. Kategori Penilaian Sub Variabel Responsibilitas**

No	Interval Kelas	Interval Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1	1,5 - 3,3	2 - 3	TB	1	2,5
2	3,4 - 5,1	4 - 5	KB	6	15,0
3	5,2 - 6,9	6	CB	5	12,5
4	7,0 - 8,7	7 - 8	B	20	50,0
5	8,8 - 10,5	9 - 10	SB	8	20,0

Sumber : Diolah dari rekapitulasi jawaban responden, Januari 2022

Responsibilitas merupakan pelaksanaan organisasi publik didasarkan pada prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun ketentuan kebijakan organisasi. Responsibilitas BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo termasuk kategori baik dengan persentase 50%. Hal tersebut diketahui bahwa mayoritas BKK telah melaksanakan layanan BKK sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Pasal 33 ayat 3. Namun, satu ketentuan yang tidak dimiliki sebagian BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo yaitu papan nama BKK dengan memperlihatkan nomor tanda daftar dari Dinas Tenaga Kerja berwarna hitam dan dasar warna putih. Papan nama tersebut merupakan ketentuan administrasi BKK yang diharuskan pada satuan pendidikan menengah yang tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Pasal 35 ayat 2. Tidak adanya papan nama tersebut, mengakibatkan kurang optimalnya kinerja BKK sebagaimana papan nama BKK berfungsi untuk menjelaskan jenis organisasi yang sedang berdiri pada suatu tempat dengan keterangan legalitas pendiriannya.

Hasil survei terkait responsibilitas juga diketahui bahwa BKK jarang melakukan orientasi pra pemberangkatan dalam penempatan tenaga kerja tiap tahun dengan Dinas Tenaga Kerja. Orientasi pra pemberangkatan sebagaimana termuat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Pasal 52 ayat 2, menjelaskan mengenai; perjanjian kerja, kondisi lingkungan kerja, budaya kerja, dan kebiasaan penduduk/masyarakat di daerah tujuan penempatan, mental, disiplin, serta etos kerja.

#### 5. Akuntabilitas

**Tabel 6. Kategori Penilaian Sub Variabel Akuntabilitas**

No	Interval Kelas	Interval Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1	1,5 - 3,3	2 - 3	TB	0	0
2	3,4 - 5,1	4 - 5	KB	15	37,5
3	5,2 - 6,9	6	CB	12	30,0
4	7,0 - 8,7	7 - 8	B	8	20,0
5	8,8 - 10,5	9 - 10	SB	5	12,5

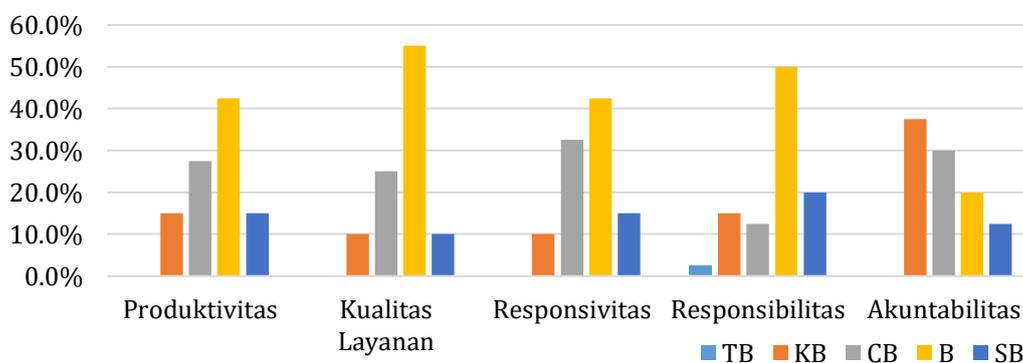
Sumber : Diolah dari rekapitulasi jawaban responden, Januari 2022

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kinerja organisasi publik yang sesuai dengan prinsip, aturan, dan etika organisasi. Akuntabilitas BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo termasuk kategori kurang baik dengan persentase 37,5% yaitu pertanggungjawaban implementasi program kegiatan serta laporan penempatan tenaga kerja BKK kepada pihak

sekolah dan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo mayoritas membuat laporan realisasi penempatan tenaga kerja per-tahun. Hal tersebut, kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana seharusnya BKK membuat laporan kegiatan atau penempatan tenaga kerja per-bulan kepada pihak sekolah dan per bulan atau per-triwulan kepada Dinas Tenaga Kerja.

Laporan pertanggungjawaban penempatan tenaga kerja penting dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi agar meningkatkan kepercayaan kedua *stakeholder* yaitu kepala sekolah dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Kepala sekolah merupakan figur penting dalam mendukung operasional pelayanan BKK melalui fasilitas dana. Dan Dinas Tenaga Kerja mendukung melalui program-program ketenagakerjaan yang inovatif guna mengurangi pengangguran di Kabupaten Sidoarjo yang didominasi oleh lulusan SMK.

Berdasarkan tabel kategori penilaian sub variabel diatas dengan melihat jumlah responden, dapat diketahui bahwa kategori penilaian sub variabel kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Kategori Masing-Masing Sub Variabel Kinerja

Sumber: Diolah dari dari tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, dan tabel 6, Januari 2022.

Berdasarkan gambar 2, diketahui mayoritas jawaban ketua BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo sebagai responden pada empat sub variabel kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan responsibilitas berada pada kategori baik. Sub variabel akuntabilitas mayoritas menunjukkan kategori kurang baik. Kategori tidak baik hanya ditemukan pada sub variabel responsibilitas.

Kategori penilaian selanjutnya yakni pada variabel kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Kategori Penilaian Variabel Kinerja

No	Interval Kelas	Interval Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1	19,5 – 35,7	20 – 35	TB	0	0
2	35,8 – 51,9	36 – 51	KB	3	7,5
3	52,0 – 68,1	52 – 68	CB	16	40,0
4	68,2 – 84,3	69 – 84	B	17	42,5
5	84,4 – 100,5	85 – 100	SB	4	10,0

Sumber : Diolah dari rekapitulasi jawaban responden, Januari 2022

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa mayoritas jawaban ketua BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo sebagai responden menunjukkan kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo termasuk kategori baik, sebagaimana pernyataan dari 17 responden atau 42,5% dan posisi kedua yakni 16 responden menyatakan kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo cukup baik yaitu 40%. Kemudian 4 responden menyatakan kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo sangat baik yaitu 10%. Namun, ditemukan juga bahwa kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo kurang baik sebagai halnya menempati posisi persentase terendah yaitu 7,5% dari pernyataan dari 3 responden.

## Analisis Teoritis

Mahsun (2013) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik ialah organisasi yang berorientasi terhadap kepentingan umum dan mengadakan barang atau jasa ke publik melalui pajak atau pendapatan negara lainnya sebagaimana diatur dengan hukum. Sejalan dengan pendapat Joedono (2000) dikutip (Majid, 2019) organisasi publik merupakan organisasi dengan kepentingan publik sebagai orientasi utamanya bukan laba. Organisasi sektor publik dalam implementasinya tetap diawasi oleh pemerintah melalui regulasi yang telah ditentukan. Sebagaimana BKK SMK sebagai salah satu organisasi sektor publik yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja dan sumber dana operasionalnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitas Pembentukan Pusat Pengembangan Karir Siswa/Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2020. BKK SMK merupakan organisasi sektor publik dengan pelayanan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, pelayanan fasilitasi pelatihan *entrepreneur*, pelayanan fasilitasi keterampilan tambahan, serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja kepada lulusan SMK.

BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi sektor publik yang sangat kompleks dalam memberikan atau merupakan *pure-nonprofit organization* yakni organisasi yang mengadakan jasa guna melayani dan memajukan kesejahteraan ketenagakerjaan lulusan SMK. Hasil (*outcome*) dari berbagai program kegiatan BKK SMK Kabupaten Sidoarjo diharapkan *impact* dirasakan para siswa maupun lulusan, pihak sekolah, Dinas Tenaga Kerja, serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo dengan *main target* keterserapan lulusan SMK di Dunia Kerja/Dunia Usaha minimal 75%.

Pengukuran kinerja sebagai komponen penting dari proses pengendalian manajemen (Mahmudi, 2015). Sebagaimana pengukuran kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo melalui 5 dimensi pengukuran kinerja diatas sebagai pengendalian manajemen organisasi karena diketahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi BKK dan diperoleh pembelajaran penting bagi organisasi BKK seperti sarana pembelajaran petugas BKK untuk kedepan agar ditingkatkan strategi/keahlian pelaksanaan *tracer study* dan konsistensi dalam memberikan pelatihan keterampilan tambahan maupun pelatihan *entrepreneur*. Pengukuran kinerja tersebut juga sebagai sarana perumusan solusi atas problema kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo.

## SIMPULAN

Berdasarkan penyajian data dan analisis data serta pembahasan, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan penelitian yaitu kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo mayoritas berada pada kategori baik dengan jumlah 17 responden atau 42,5% dari total responden dan posisi kedua berada pada kategori cukup baik dengan jumlah 16 responden atau 40% dari total keseluruhan responden. Kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo pada sub variabel produktivitas mayoritas berkategori baik dengan jumlah 17 responden atau 42,5% dari jumlah keseluruhan responden. Kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo pada sub variabel kualitas pelayanan mayoritas berkategori baik dengan jumlah 22 responden atau 55% dari jumlah keseluruhan responden. Kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo pada sub variabel responsivitas mayoritas berkategori baik dengan jumlah 17 responden atau 42,5% dari jumlah keseluruhan responden. Kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo pada sub variabel tanggungjawab mayoritas berkategori baik dengan jumlah 20 responden atau 50% dari jumlah keseluruhan responden. Kinerja BKK SMK di Kabupaten Sidoarjo pada sub variabel akuntabilitas mayoritas berkategori kurang baik dengan jumlah 15 responden atau 37,5% dari jumlah keseluruhan responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. (2020). No.86/11/Th. XXIII  
Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Agustus 2020. (2020).  
No.70/11/35/Thn.XVIII  
Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Sidoarjo Agustus 2020. (2020). No.1/11/Thn.2020

 <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>

 mahesainstitut@gmail.com 2705



- bkk.ditpsmk.net. (2018). Bursa Kerja Khusus. Diunduh di <http://bkk.ditpsmk.net/about>
- Cahyanti, S. D., Indriayu, M., & Sudarmo. (2018). Implementasi Program Link and Match dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri pada Lulusan Pemasaran SMK Negeri 1 Surakarta, BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekono, 4 (1).
- Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. (2018). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Listiana, D. (2019). Manajemen Bursa Kerja Khusus dalam Upaya Peningkatan Penyaluran Lulusan SMK ke Dunia Kerja, Media Manajemen Pendidikan. 2 (2), 325-338.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM UKPN.
- Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Pertama). Yogyakarta: BPFE.
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. CV. Sulawesi Selatan: Berkah Utami.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 15 (1), 127-138.
- Mulyatiningsih, Endang, Soegiyono, Purwanti, & Sutriyanti. (2014). Materi Pembekalan Pengembangan Edupreneurship Sekolah Menengah Kejuruan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putra, A. L., Gunawan Irianto, W. S., & Soraya, D. U. (2019). Evaluasi penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus Dalam Membantu Menyalurkan Lulusan Ke Industri di SMK Negeri 1 Udanawu Kabupaten Blitar, Tekno (Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan), 28 (2): 130-141.
- Riduwan. (2014). Pengantar Statistika Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Rosni, W. L., Hernawan, D., Pratidina, G., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., Tol, J., No, C., Pos, K., Wina, K., & Rosni, L. (2020). Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah ( Studi Kasus Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ), Jurnal GOVERNANSI, 6 (1), 43-50.
- Siagian, S. P. (2020). Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya (Kedua). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suwandono, Y., & Laksmi, V. V. (2019). Manajemen Perubahan Menuju Organisasi Berkinerja Tinggi. Yogyakarta: Deepublish.
- Triana, N., Oktarina, N., & Rozi, F. (2021). Pelaksanaan Layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) Dalam Upaya Meningkatkan Keterserapan Lulusan, Economic Education Analysis Journal, 10 (1), 116-129.

